

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kenaikan retribusi parkir berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2023 di Banjarmasin memiliki dampak yang beragam. Secara positif, kebijakan ini meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp4,4 miliar pada 2023 menjadi Rp5,5 miliar pada 2024 dan memperbaiki pengelolaan fasilitas parkir. Namun, kebijakan ini belum efektif mendorong penggunaan transportasi massal dan menertibkan lalu lintas, karena masyarakat tetap mengandalkan kendaraan pribadi.

Dampaknya terhadap pedagang kaki lima (PKL) juga beragam. Sebagian besar melaporkan penurunan jumlah pengunjung, peningkatan biaya operasional, dan terbatasnya dukungan pemerintah. Meskipun demikian, beberapa pedagang merasakan manfaat dari pengelolaan parkir yang lebih rapi dan nyaman bagi pengunjung. Pemerintah perlu mengevaluasi dampak kebijakan ini secara menyeluruh dan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk mendukung pedagang kecil tanpa mengurangi tujuan utama kebijakan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian lalu lintas tercapai tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada pedagang kecil. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial, perlu memberikan dukungan langsung kepada pedagang kaki lima yang terkena dampak kebijakan, misalnya melalui bantuan modal, pelatihan, atau pengurangan pungutan lain seperti biaya kebersihan dan keamanan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan dari kenaikan tarif parkir dipahami oleh semua pihak, termasuk manfaat jangka panjangnya bagi pengelolaan lalu lintas dan lingkungan. Pemerintah harus memperkuat koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan dinas lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara holistik, mencakup pengelolaan parkir, pengawasan, serta bantuan sosial-ekonomi kepada kelompok terdampak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan riset ke dinas perdagangan dan dinas koperasi agar data yang di peroleh akan lebih besar dan luas untuk melihat dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima.